



RENCANA KERJA (RENJA)

2026



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, 25 November 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, maka dengan Undang-Undang ini kita dapat mengetahui satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai Pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272- 273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional secara sistematis, terarah, menyeluruh, terukur dan tanggap terhadap perubahan.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renja PD, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan yang terakhir penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, oleh karenanya Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Selain itu juga dengan mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Misi ke-1: Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; Misi ke-3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas ; dan Misi ke-5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Mendukung program Asta Cita serta dalam rangka implementasi 136 program prioritas/intervensi/aksi /taktis Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah fokus dan mendukung pada program intervensi yaitu digitalisasi manajemen kearsipan dan pada peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyempurnaan layanan kearsipan dinamis berbasis TI dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 59);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Tahun 2026, dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu :

- 1) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan dapat menjamin konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, penyusunan strategi sampai dengan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (rencana operasional tahunan);
- 2) Sebagai pedoman dan alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas dan jelas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra PD Tahun 2024 -2026, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta review terhadap Renstra PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta manajemen risiko strategis perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan tujuan dan sasaran Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Kemudian menjabarkan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2026 yang kemungkinan mengalami perubahan serta manajemen risiko program dan kegiatan PD Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 memberikan informasi tingkat ketercapaian target kinerja terhadap kondisi akhir Renstra, faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang bermanfaat untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026.

Pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian serta perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung dengan Anggaran sebesar Rp.50.633.003.000,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.43.305.904.000,- yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.15.902.323.000,- dan Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.27.403581.000,- Belanja Modal sebesar Rp.7.327.099.000,- dan APBN melalui Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 435.287.000,- dari Perpustakaan Nasional RI.

Realisasi anggaran dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.49.580.698.322,- (97,92%), terdiri dari realisasi keuangan bidang kearsipan sebesar Rp.877.754.531,- (99,58%), realisasi keuangan bidang perpustakaan sebesar Rp16.896.832.566,- (99,58%), dan realisasi keuangan urusan penunjang sebesar Rp.31.806.111.225,- (97,02%). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.052.304.678,- (2,08%), sedangkan untuk realisasi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.409.270.500,- (94,02%) untuk melaksanakan 5 Program, 24 Kegiatan, 58 Sub Kegiatan dan 102 sub-sub kegiatan, yang terdiri dari satu Program Kegiatan Rutin (Ex BAU), satu Program Urusan Wajib Kearsipan dan satu Program Urusan Wajib Perpustakaan.

Urusan Kearsipan terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator program sebanyak 5 indikator, adapun capaian indikator program sebanyak 5 indikator melebihi target yaitu Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya dengan capaian target 146,90%, Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK dengan capaian target 178,26%, Persentase peningkatan pengunjung arsip dengan capaian target 187,37%, Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip dengan capaian target 102,54%, dan Persentase arsip yang diselamatkan dengan capaian target 133,38%.

Sedangkan urusan perpustakaan dilaksanakan melalui dua program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi

Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator program sebanyak 4 indikator, adapun capaian indikator program sebanyak 1 indikator memenuhi target yaitu Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca dengan capaian target 100%, dan sebanyak 3 indikator program melebihi target yaitu, Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi dengan capaian target 103,44%, Nilai survey kepuasan masyarakat dengan capaian target 106,25%, dan Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan capaian target 101,57%.

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya, Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip dengan tingkat ketercapaian 100% (target 41 unit realisasi 41 unit), Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun) dengan tingkat ketercapaian 100% (target 5 OPD realisasi 5 OPD), Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi dengan tingkat ketercapaian 100% (target 5 unit realisasi 5 unit), Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi dengan tingkat ketercapaian 100% (target 10 orang realisasi 10 orang), Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian 100% (target 6 jenis realisasi 6 jenis), Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dengan tingkat ketercapaian 100% (target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan), Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi dengan tingkat ketercapaian 100% (target 20 orang realisasi 20 orang), Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng dengan tingkat ketercapaian 100% (target 184 unit realisasi 184 unit), Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan dengan tingkat ketercapaian 100% (target 2 dokumen realisasi 2 dokumen), Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan dengan tingkat ketercapaian 100% (target 25 eksemplar realisasi 25 eksemplar).

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya dengan tingkat ketercapaian 145% (target 20 unit realisasi 29 unit), Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian dengan tingkat ketercapaian 221,90% (target 1.000 arsip realisasi 2.219 arsip), Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya dengan tingkat ketercapaian 134,62% (target 10.500 dokumen realisasi 14.135 dokumen), Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD dengan tingkat ketercapaian 133,02% (target 71,42% realisasi 95%), Jumlah arsip yang terlayankan dengan tingkat ketercapaian 121,25% (target 800 arsip realisasi 970 arsip), Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi dengan tingkat ketercapaian 116,67% (target 150 arsip realisasi 175 arsip), Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan dengan tingkat ketercapaian 103,40% (target 256.500 arsip realisasi 265.217 arsip), Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian 120,41% (target 4,90% realisasi 5,90%), Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi

Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian 115,69% (target 2.657.000 orang realisasi 3.073.789 orang), Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah dengan tingkat ketercapaian 101,91% (target 367 eksemplar realisasi 374 eksemplar).

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya bahkan melebihi target kinerja program dan kegiatan dalam urusan kearsipan dan perpustakaan antara lain adalah adanya perencanaan yang matang serta pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik di seluruh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas dan komitmen SDM dalam pengelolaan arsip dan pengembangan perpustakaan turut mendukung tercapainya target, termasuk penerapan sistem digital seperti SIKD yang mempercepat dan mempermudah proses kearsipan. Selain itu, kolaborasi yang kuat antarinstansi, meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsip dan literasi, serta dukungan partisipatif dari masyarakat dan lembaga pendidikan juga menjadi pendorong utama keberhasilan. Upaya intensif dalam sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, serta pelestarian koleksi dan budaya lokal memperkuat kinerja program, sehingga capaian indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yaitu seluruh indikator kinerja memenuhi dan melebihi target. Capaian target dimaksud menjadi bagian tercapainya renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil dengan menyesuaikan dan atau berpedoman pada Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari”, yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Hasil reuiu capaian kinerja Renja tahun 2024 dan Perkiraan capaian tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan s/d Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEARSIPAN										
I	Program Pengelolaan Arsip	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	32,89	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	25,97	38,15	146,90	30,26	30,26	100

1	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	Unit	25	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	20	29	145	23	23	100
2	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	71,42	95	133,02	85,36	85,36	100
II	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	178,26	178,26	100	100	100
1	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	4.500	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	1.000	2.219	221,90	1.500	1.500	100

2	Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	36.370	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	10.500	14.135	134,62	12.000	12.000	100
III	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	19	35,60	187,37	79	79	100
1	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	3.000	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	800	970	121,25	1.000	1.000	100
2	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	123	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	41	41	100	41	41	100

IV	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang diselamatkan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	19,47	25,97	133,38	65,92	65,92	100
1	Keg. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	1.500	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	150	175	116,67	500	500	100
2	Keg. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	283.370	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	256.500	265.217	103,40	272.000	272.000	100
V	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	22,50	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	12,19	12,50	102,54	20	20	100

1	Keg. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	9	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	5	5	100	8	8	100
	URUSAN PERPUSTAKAAN										
VI	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	80	85	106,25	80	80	100
1	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	6	6	100	10	10	100
2	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	15	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	4,9	5,9	120,41	5	5	100

3	Keg. Kebudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	60	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	20	20	100	20	20	100
4	Keg. Kebudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	7.971.000	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	2.657.000	3.073.789	115,69	2.657.000	2.657.000	100
VII	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	80,56	83,33	103,44	88,89	88,89	100
1	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	25	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	5	5	100	8	8	100

2	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	60	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	10	10	100	20	20	100
VIII	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	23,08	23,08	100	61,54	61,54	100
1	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	9	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	2	2	100	3	3	100
IX	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	84,67	86	101,57	92,25	92,25	100

X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100
1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	1	1	100	1	1	100
2	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	1	1	100	1	1	100
3	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100

4	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100
5	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	173	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	2	18	900	0	0	100
6	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	8	8	100	8	8	100
7	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	405	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	135	154	114,07	50	50	100

XI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100
1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas indikator Program pada Renstra PD 2024-2026 dengan menyajikan Realisasi capaian pada tahun 2024 dan proyeksi capaian pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikaor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Kearsipan							
1	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya			26,32%	30,26%	38,15%	30,26%	
2	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK			100%	100%	178,26%	100%	
3	Persentase peningkatan pengunjung arsip			19%	79%	35,60%	79%	

No	Indikaor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase arsip yang diselamatkan			32,96%	65,92%	25,97%	65,92%	
5	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip			17,5%	20%	12,50%	20%	
	Urusan Perpustakaan							
1	Nilai survey kepuasan masyarakat			80 nilai	80 nilai	85 nilai	80 nilai	
2	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi			80,56%	88,89%	83,33%	88,89%	
3	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca			23,08%	61,54%	23,08%	61,54%	
4	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal			84,67%	92,25%	86%	92,25%	

No	Indikaor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah							
	Non Urusan							
1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	
2	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan kearsipan dan urusan perpustakaan, dimana aktivitas utama kedua urusan tersebut yaitu pengelolaan informasi.

Penyelenggaraan kearsipan daerah, baik pembangunan maupun proses penyelenggaraannya, harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah Jawa Tengah sehingga peran dan fungsi arsip sebagai alat bukti yang sah, bukti akuntabilitas kinerja, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dapat dioptimalkan untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berperadaban tinggi

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan dengan jelas mengenai hak, kewajiban dari masyarakat serta kewenangan dari pemerintah. Semua lapisan masyarakat baik itu daerah terpencil, terisolasi dan terbelakang, masyarakat yang sehat, cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau social, semuanya mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan dari perpustakaan. Masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga, memelihara, mengikuti setiap peraturan dari perpustakaan.

a. Mengingat pentingnya peran arsip dan perpustakaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan harus mampu menyediakan layanan yang efektif, inovatif dan adaptif. Sejalan dengan arahan nasional yaitu percepatan penerapan aplikasi kearsipan berbasis elektronik untuk menjamin ketersediaan arsip autentik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas melalui pemanfaatan perpustakaan, dan Tujuan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari“ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, memiliki fungsi diantaranya:

a) perumusan kebijakan Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan;

- b) pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan;
- d) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

1. Bidang Perpustakaan

- a) Tingkat Ketercukupan Koleksi bahan perpustakaan lingkup daerah maupun nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk naskah nusantara sebagai warisan dokumenter bangsa masih kurang;
- b) Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan SK jabatan fungsional, mempunyai kualifikasi bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi, belum memadai dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah;
- c) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka masih rendah.

2. Bidang Kearsipan

- a) Penyelenggaraan kearsipan daerah saat ini belum terpadu, sistemik, dan komprehensif Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kearsipan baik pelaku dan penyelenggara kearsipan;
- b) Kearsipan belum optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;
- c) Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar

dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu disiapkan kebijakan sistem kearsipan nasional untuk dapat menjadi pedoman tatakelola dan tatalaksana dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

- d) Ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya kearsipan lainnya masih belum memadai.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Adapun Tujuan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari“

Sasaran :

- 1) Meningkatnya perekonomian Tangguh dan Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif;
- 3) Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam perwujudan Sasaran Pembangunan Daerah ke-2 yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif dan ke-4 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

d. Tantangan dan Peluang

Tantangan

Kearsipan

- a. Meningkatkan Keamanan dan Privasi Arsip elektronik dari pencurian data, kebocoran informasi, dan serangan siber;
- b. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan instansi dalam memahami pentingnya arsip;
- c. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif;
- d. Meningkatkan sarana prasarana termasuk teknologi dan infrastruktur;
- e. Melaksanakan migrasi ke Arsip Digital dan perubahan budaya kerja.

Perpustakaan

- a. Melaksanakan adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tetap relevan dengan kebutuhan pengguna di era digital;
- b. Peningkatan Kapasitas SDM yang kompeten dan berkualitas untuk menjadi agen informasi, dan agen perubahan, serta mampu menguasai teknologi informasi;
- c. Meningkatkan pengembangan Perpustakaan Digital.

Peluang

Kearsipan

- a. Pemerintah Daerah perlu menjamin Keamanan dan Privasi data;
- b. pengembangan Big Data Kearsipan Daerah Provinsi (big archives), sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- c. Meningkatkan akses dan layanan arsip digital guna peningkatan dan perluasan terhadap pemanfaatan arsip untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perpustakaan

- a. Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya perpustakaan sebagai pusat pembelajaran aktif, hubungan inovasi, dan pusat pengembangan masyarakat melalui teknologi dan informasi;
- b. Peningkatan koleksi perpustakaan berbasis budaya lokal (local content) untuk menarik dan meningkatkan minat baca serta ketertarikan masyarakat terhadap layanan dan koleksi perpustakaan;
- c. Pengembangan perpustakaan sebagai pusat repository warisan dokumenter intelektual bangsa dalam format digital bertujuan memberikan kemudahan dan keamanan terhadap akses data dan informasi.

e. Formulasi Isu-isu Penting

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa alternatif rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengelolaan sistem kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi;

- 2) Peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Peningkatan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat melalui peningkatan sarpras untuk mendukung teknologi informasi;
- 4) Pemberdayaan lembaga kearsipan dan perpustakaan melalui sosialisasi bidang kearsipan dan perpustakaan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan dengan prediksi pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. Renja disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen, perlu dilakukan reviu terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 nilai	1.558.500	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 nilai	1.558.500
2	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	100%	775.000	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	100%	775.000
3	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	100%	360.000	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	100%	360.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
4	Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	100%	42.304	Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	100%	42.304
5	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase LKD Provinsi/Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya	32,89%	725.000	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase LKD Provinsi/Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya	32,89%	725.000
6	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Provinsi sesuai NSPK	100%	606.845	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Provinsi sesuai NSPK	100%	606.845
7	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	100%	750.000	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	100%	750.000
8	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase arsip yang diselamatkan	100%	120.756	Program Perlindungan dan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase arsip yang diselamatkan	100%	120.756

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
						Penyelamatan Arsip				
9	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	22,5%	123.860	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	22,5%	123.860

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki Program/Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional menjadi salah satu rujukan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, antara lain Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026 dengan tema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, dengan prioritas daerah “Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, dan Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter”. Prioritas daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD, dan juga dalam rangka untuk membangun sinergi, keselarasan, kerja sama, kolaborasi, dan sinkronisasi antarsektor agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal, serta mendukung pencapaian Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, dari swasembada pangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan kesehatan hingga penguatan pertahanan negara. Program prioritas ini juga mencakup perlindungan hak perempuan, anak, dan disabilitas, pelestarian budaya dan lingkungan, serta pengembangan kota yang inovatif dan mandiri, termasuk IKN, demi Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing global.

Sinergi prioritas nasional atau Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur” dan “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas” melalui Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi, Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN, Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat, Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi, Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan tahunan, memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renja Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah

Sasaran utama pembuatan RENJA (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan dalam satu tahun, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan penyusunan anggaran. RENJA juga berfungsi untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan tahunan

Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2026 merujuk kepada Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, mendukung Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Jawa Tengah 2025-2029 yaitu “Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, dan Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter”.

Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan literasi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng
2. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Angka	96.27
1.1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Angka	97.29
1.2			Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%	50
2	Meningkatkan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	42
2.1		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat		Angka	68.5
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	73.78
3.1		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	85.45
3.2		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	3.08

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko-risiko strategis yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Proses ini bertujuan untuk mengelola risiko-risiko prioritas yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, sehingga pencapaian tujuan strategis dapat dioptimalkan. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	Melaksanakan monev pelaksanaan Standar Pelayanan dan pengembangan jenis layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat	Kepala Dinas	Triwulan IV
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	12	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan	Mengidentifikasi risiko, mengendalikan dan memantau efektivitas pengendalian risiko	Kepala Dinas	Triwulan IV
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan	Pengolahan arsip tidak maksimal	1. Merevisi Pedoman Kerasipan Daerah 2. Pemenuhan sarpras kearsipan sesuai NSPK	Kepala Dinas	Triwulan IV

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Daerah Provinsi				level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai				
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase arsip bersejarah yg ditetapkan sebagai MKB	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	1. Koordinasi dengan pemilik sumber informasi, baik masyarakat maupun instansi/lembaga pemerintah yang lain 2. Melakukan penelusuran arsip sesuai tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa	Kepala Dinas	Triwulan IV
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Masyarakat tidak berminat membaca	16	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Melakukan penambahan koleksi bahan pustaka yang uo to	Kepala Dinas	Triwulan IV

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		buku		telah ada namun belum menjadi prioritas	rendah	date dan sesuai kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi untuk peningkatan budaya gemar membaca		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah									617,892,000		1,417,000,000
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Angka	96.27		96.37	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah								617,892,000		1,417,000,000
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Angka	97.29	459,117,000	97.39	1,041,000,000
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						439,052,000		573,000,000
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44.74	261,125,000	47.37	573,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					261,125,000		573,000,000
						Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Orang	5	10,000,000	36	250,000,000
		2.24.02.1.01.0009			Penyusunan Database Arsiparis				10,000,000		10,000,000
						Jumlah arsiparis	Dokumen	1	10,000,000	1	10,000,000
						Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Instansi	51	116,125,000	51	313,000,000
		2.24.02.1.01.0008			Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				116,125,000		313,000,000
						Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	51	116,125,000	51	313,000,000
						Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Lembaga	34	135,000,000	5	10,000,000
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				135,000,000		250,000,000
						Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	135,000,000	117	250,000,000
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79.15	177,927,000	85.17	405,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					177,927,000		405,000,000
						Jumlah arsip statis yang terkelola	Arsip	146012	177,927,000	158012	405,000,000
		2.24.02.1.02.0003			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				13,508,000		30,000,000
						Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang	2	13,508,000	2	30,000,000
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis				34,225,000		125,000,000
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	34,225,000	1500	125,000,000
		2.24.02.1.02.0006			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				130,194,000		250,000,000
						jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip	13500	130,194,000	13500	250,000,000
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						20,065,000		63,000,000
						Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20.34	9,012,000	76.19	19,000,000
		2.24.03.1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					9,012,000		19,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	11.4	9,012,000	2634	19,000,000
		2.24.03.1.02.000 1			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				9,012,000		19,000,000
						Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	600	9,012,000	600	19,000,000
						Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%	11.4	5,000,000	11.76	25,000,000
		2.24.03.1.04			Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				5,000,000		25,000,000
						Jumlah Arsip yang dialih-mediakan	Arsip	20.34	5,000,000	7315	25,000,000
		2.24.03.1.04.000 2			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				5,000,000		25,000,000
						Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	670	5,000,000	770	25,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66.67	6,053,000	60	376,000,000
		2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					6,053,000		19,000,000
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Arsip	10000	6,053,000	10000	19,000,000
		2.24.03.1.01.0004			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				6,053,000		19,000,000
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	10000	6,053,000	10000	19,000,000
						Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%	50	158,775,000	26.34	19,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						158,775,000		376,000,000
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85.7	158,775,000	85.8	376,000,000
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					158,775,000		376,000,000
						Jumlah Arsip yang terlayankan	Arsip	1000	75,000,000	1000	188,000,000
		2.24.02.1.03.0001				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			75,000,000		188,000,000
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	3500	75,000,000	3600	188,000,000
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	83,775,000	41	188,000,000
		2.24.02.1.03.0002				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			83,775,000		188,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	4	83,775,000	4	188,000,000
Meningkatkan literasi masyarakat									1,572,289,000		2,543,250,000
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	42		15.99	2,543,250,000
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat								1,572,289,000		2,543,250,000
						Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Angka	68.5	1,572,289,000	78.5	2,543,250,000
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1,469,708,000		1,052,000,000
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85.2	788,796,000	46.15	1,052,000,000
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					502,480,000		388,000,000
						Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	3166650	5,000,000	4	250,000,000
		2.23.02.1.01.0011			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				5,000,000		19,250,000
						Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh	Dokumen	1	5,000,000	1	19,250,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						masyarakat					
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	46,500,000	14	156,750,000
		2.23.02.1.01.000 2			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				26,500,000		94,000,000
						Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	6	26,500,000	6	94,000,000
		2.23.02.1.01.001 5			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				20,000,000		62,750,000
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	20,000,000	1	62,750,000
						Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	%	5	450,980,000	3	632,500,000
		2.23.02.1.01.000 9			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				450,980,000		632,500,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10386	450,980,000	6304	632,500,000
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					286,316,000		664,000,000
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	1070	286,316,000	2	38,000,000
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				286,316,000		38,000,000
						Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	286,316,000	13	38,000,000
						Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%	45.27	680,912,000	2	626,000,000
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					126,604,000		438,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Perpustakaan	4	52,000,000	12	438,000,000
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				23,620,000		188,000,000
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	23,620,000	1	188,000,000
		2.23.02.1.01.0017			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi				28,380,000		125,000,000
						Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	28,380,000		125,000,000
						Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP	Perpustakaan	270	12,785,000	1	125,000,000
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				12,785,000		125,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	12,785,000	15	125,000,000
						Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Orang	25	61,819,000	30	100,000,000
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				61,819,000		100,000,000
						Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	30	61,819,000	35	100,000,000
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					554,308,000		664,000,000
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	2	524,308,000	2	626,000,000
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				182,294,000		438,000,000
						Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	12	182,294,000	12	438,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.02.1.02.000 6			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				342,014,000		188,000,000
						Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	342,014,000	1	188,000,000
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Kegiatan	2	30,000,000	2	38,000,000
		2.23.02.1.02.000 1			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				30,000,000		38,000,000
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	13	30,000,000	13	38,000,000
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						102,581,000		182,750,000
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9.43	102,581,000	9.65	182,750,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.03.1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					46,535,000		81,500,000
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penerbit	88	46,535,000	93	81,500,000
		2.23.03.1.01.000 1			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				6,535,000		19,000,000
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	3400	6,535,000	3800	19,000,000
		2.23.03.1.01.000 2			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				40,000,000		62,500,000
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	6	40,000,000	6	62,500,000
		2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					21,430,000		50,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	21,430,000	2	50,000,000
		2.23.03.1.02.000 1			Penerbitan Katalog Induk Daerah				11,535,000		25,000,000
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	5000	11,535,000	5600	25,000,000
		2.23.03.1.02.000 2			Penerbitan Bibliografi Daerah				9,895,000		25,000,000
						Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	9,895,000	1	25,000,000
		2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					14,326,000		18,750,000
						Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan	Eksemplar	269	14,326,000	276	18,750,000
		2.23.03.1.03.000 3		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					14,326,000		18,750,000
						Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	6	14,326,000	7	18,750,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.03.1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					20,290,000		32,500,000
						Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah	Eksemplar	415	20,290,000	437	32,500,000
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				8,800,000		12,500,000
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	19	8,800,000	22	12,500,000
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				11,490,000		20,000,000
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	22	11,490,000	22	20,000,000
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									30,309,985,000		36,742,595,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	73.78		73.98	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								30,131,669,000		36,014,945,000
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	85.45	30,131,669,000	85.55	36,014,945,000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30,131,669,000		36,014,945,000
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	30,131,669,000	100	36,014,945,000
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24,997,559,000		28,124,017,000
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	24,997,559,000	1	28,124,017,000
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24,770,389,000		27,734,017,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	147	24,770,389,000	147	27,734,017,000
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				227,170,000		390,000,000
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	227,170,000	1	390,000,000
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					91,708,000		121,000,000
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	91,708,000	1	121,000,000
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2,200,000		11,000,000
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2,200,000	1	11,000,000
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				89,508,000		110,000,000
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	89,508,000	1	110,000,000
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17,700,000		80,500,000
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	17,700,000	100	80,500,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2,500,000		11,500,000
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	2,500,000	1	11,500,000
		X.XX.01.1.05.000 5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5,200,000		11,500,000
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5,200,000	1	11,500,000
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10,000,000		57,500,000
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	10,000,000	20	57,500,000
		X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				884,438,000		1,167,750,000
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	884,438,000	100	1,167,750,000
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50,000,000		86,250,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	1	86,250,000
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78,380,000		138,000,000
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	78,380,000	1	138,000,000
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10,000,000		57,500,000
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	1	57,500,000
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155,250,000		230,000,000
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	155,250,000	5	230,000,000
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12,345,000		23,000,000
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12,345,000	1	23,000,000
		X.XX.01.1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5,000,000		23,000,000
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5,000,000	1	23,000,000
		X.XX.01.1.06.000 8			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100,000,000		172,500,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	100,000,000	1	172,500,000
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				246,279,000		300,000,000
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	246,279,000	1	300,000,000
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5,184,000		27,500,000
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5,184,000	1	27,500,000
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				222,000,000		110,000,000
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	222,000,000	2	110,000,000
		X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				424,295,000		377,538,000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	45	424,295,000	59	377,538,000
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****						377,538,000
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****		0	-	1	377,538,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X.XX.01.1.07.000 6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				136,000,000		0
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	136,000,000	0	0
		X.XX.01.1.07.001 0			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				288,295,000		0
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	288,295,000	0	0
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,186,166,000		3,998,450,000
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3,186,166,000	1	3,998,450,000
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,500,000		3,450,000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1,500,000	1	3,450,000
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,100,000,000		1,350,000,000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1,100,000,000	1	1,350,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X.XX.01.1.08.000 3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120,000,000		115,000,000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	120,000,000	1	115,000,000
		X.XX.01.1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,964,666,000		2,530,000,000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,964,666,000	1	2,530,000,000
		X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				529,803,000		2,145,690,000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	165	529,803,000	156	2,145,690,000
		X.XX.01.1.09.000 1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30,000,000		34,500,000
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30,000,000	2	34,500,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X.XX.01.1.09.000 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112,553,000		172,500,000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	112,553,000	23	172,500,000
		X.XX.01.1.09.000 5			Pemeliharaan Mebel				5,000,000		11,500,000
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	5,000,000	15	11,500,000
		X.XX.01.1.09.000 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35,000,000		150,000,000
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	41	35,000,000	105	150,000,000
		X.XX.01.1.09.000 9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				107,300,000		1,040,000,000
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	107,300,000	2	1,040,000,000
		X.XX.01.1.09.001 0			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				151,200,000		162,500,000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	151,200,000	2	162,500,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X.XX.01.1.09.001 1			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88,750,000		574,690,000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	88,750,000	63	574,690,000
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								178,316,000		727,650,000
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	3.08	178,316,000	3.13	727,650,000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						178,316,000		727,650,000
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	178,316,000	100	727,650,000
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					178,316,000		727,650,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	178,316,000	100	727,650,000
		X.XX.01.1.01.000 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				143,396,000		660,000,000
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	143,396,000	5	660,000,000
		X.XX.01.1.01.000 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,920,000		55,000,000
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	24,920,000	5	55,000,000
		X.XX.01.1.01.000 8			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5,000,000		6,325,000
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	67	5,000,000	67	6,325,000
		X.XX.01.1.01.001 0			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5,000,000		6,325,000
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5,000,000	1	6,325,000
JUMLAH									32,500,166,000		40,702,845,000

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	12	Berkurangnya prioritas anggaran terkait akreditasi	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi	Dinas Arpus Provinsi akan memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan reakreditasi dan pendataan perpustakaan	Kabid Pengembangan Perpustakaan	TW III
Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	12	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi	Melaksanakan fasilitasi kegiatan uji sertifikasi Pustakawan	Kelompok Kerja Pembinaan Perpustakaan	TW II
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tk. Daerah provinsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	12	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Mengadakan Kegiatan Lomba Bidang Perpustakaan; Bimtek Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi; Lomba Video Konten Literasi; Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Membaca; dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kelompok Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca	TW I dan TW II
Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai SNP	12	Penentuan target kinerja tidak berdasarkan judul	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam jumlah eksemplar	Peningkatan ketersediaan keberagaman koleksi perpustakaan dengan menambah judul dan meminimalkan eksemplar	Kelompok Kerja Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	TW IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	12	Pengolahan koleksi etnis budaya nusantara masih dari hibah masyarakat	Kebutuhan informasi Koleksi etnis budaya nusantara belum terpenuhi	Seleksi dan akuisisi dari hibah masyarakat	Kelompok Kerja Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	TW IV
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Jumlah arsip statis pada LKD Provinsi/Kabupatten/ Kota masih sangat terbatas	12	Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip bernilai statis masih kurang	Pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah belum sampai pada tahap penyusutan (usul serah dan usul Musnah)	Pendampingan terhadap Perangkat Daerah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	Kelompok Kerja Pengawasan Kearsipan	TW IV
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Jawa Tengah	Kwantitas belum sebanding dengan kualitas arsiparis	16	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi	Melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional RI dan BPSDMD Prov. Jateng untuk pelaksanaan sertifikasi maupun uji kompetensi bidang kearsipan	Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	TW IV
Kegiatan Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Tidak terselamatkannya arsip yang bernilai guna kesejarahan dan bernilai guna nasional	12	Kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya arsip untuk di masa yang akan datang untuk sumber primer sejarah	Arsip yang bernilai guna kesejarahan dan bernilai guna nasional tidak terselamatkan	Mensosialisasikan penyelamatan arsip yang bernilai guna kesejarahan dan bernilai guna nasional ke PD	Kelompok Kerja Akuisisi Arsip	TW I sampai dengan TW IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yg dinyatakan hilang	Tidak terselamatkannya arsip yang dinyatakan hilang	12	Arsip belum diketahui keberadaannya	Tidak terselamatkannya informasi dan fisik arsip yang terkandung pada arsip yang dinyatakan hilang	Mengidentifikasi keberadaan arsip yang dinyatakan hilang untuk dilakukan akuisisi/penyelamatan	Kelompok Kerja Akuisisi Arsip	TW I sampai dengan TW IV

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renja dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kearsipan dan perpustakaan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam dokumen Renja tersebut agar terlaksana secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang terstruktur, penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Tengah dapat lebih efektif dan efisien. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 memuat program dan kegiatan pembangunan yang penyusunannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai pedoman operasional, maka ditetapkan kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2026 dan menjadikan target indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta pemenuhan capaian target akhir Renstra Tahun 2025-2029;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 akan dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan diinput dalam sistem *e-controlling*;
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terukur dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan layanan kearsipan dan perpustakaan bagi masyarakat Jawa Tengah.

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	Risiko Strategis	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai	Pengolahan arsip tidak maksimal	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	Risiko Strategis	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Masyarakat tidak berminat membaca buku	Risiko Strategis	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah	Pemerintah Daerah dan masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	Risiko Strategis	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan	OPD
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Risiko Strategis	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	OPD dan masyarakat

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	5	5	25	Ada	Pemeliharaan dan pengadaan sarpras kearsipan	Belum Memadai	4	4	16
Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	5	5	25	Ada	- Koordinasi dengan bidang Pengolahan dan pelestarian Arsip - Melakukan penelusuran arsip sesuai tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa	Belum Memadai	4	4	16
Masyarakat tidak berminat membaca buku	5	5	25	Ada	Pembudayaan gemar membaca	Belum Memadai	4	4	16
Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	4	4	16	Ada	Pengelolaan risiko melalui proses manajemen risiko (identifikasi, monitoring dan pengendalian risiko)	Belum Memadai	3	4	12
Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	5	5	25	Ada	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Standar Pelayanan Prima, penyediaan layanan yang beragam	Belum Memadai	4	4	16

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	Kepala Dinas	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai	Pengolahan arsip tidak maksimal
Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	Kepala Dinas	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai	Pengolahan arsip tidak maksimal
Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Kepala Dinas	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas
Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Kepala Dinas	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas
Masyarakat tidak berminat membaca buku	16	Kepala Dinas	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah
Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	12	Kepala Dinas	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan
Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Kepala Dinas	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai	Pengolahan arsip tidak maksimal	Merevisi Pedoman Kearsipan Daerah	Kepala Dinas	TW IV
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai	Pengolahan arsip tidak maksimal	Pemenuhan sarpras kearsipan sesuai NSPK	Kepala Dinas	TW IV
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	Melakukan penelusuran arsip sesuai tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa	Kepala Dinas	TW IV
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	Koordinasi dengan pemilik sumber informasi, baik masyarakat maupun instansi/lembaga pemerintah yang lain	Kepala Dinas	TW IV
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Masyarakat tidak berminat membaca buku	16	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah	Melakukan penambahan koleksi bahan pustaka yang up to date dan sesuai kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi untuk peningkatan budaya gemar membaca	Kepala Dinas	TW IV
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	12	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan	Mengidentifikasi risiko, mengendalikan dan memantau efektivitas pengendalian risiko	Kepala Dinas	TW IV
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	Melaksanakan monev pelaksanaan Standar Pelayanan dan pengembangan jenis layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat	Kepala Dinas	Setiap Tahun

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indikator kinerja OPD tidak tercapai sepenuhnya	Risiko Operasional	Perencanaan dan monitoring kurang optimal	Capaian kinerja dibawah 100%	OPD
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kurang optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Minimnya jumlah barang persediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, umum, kepegawaian dan keuangan	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tidak optimal	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	Pelaksanaan pengawasan kearsipan belum sesuai dengan ketentuan	Risiko Operasional	Pelaksanaan verifikasi bukti dukung terhadap Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan secara langsung	Penetapan dan penyampaian nilai hasil pengawasan kearsipan tidak tepat waktu	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	Pengelolaan Arsip kurang sesuai NSPK	Risiko Operasional	Pemahaman pengelola arsip atas NSPK pengelolaan arsip kurang	Informasi yang terkandung dalam arsip tidak terjaga	PD, LKD, Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	Kurang optimalnya PD dalam melaksanakan pemusnahan arsip	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman peraturan yang mendukung pemusnahan arsip	Banyaknya arsip yang tidak bernilai guna di PD	PD, LKD, Masyarakat
3	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat bencana	Risiko Operasional	Fisik arsip rusak akibat bencana	Hilangnya arsip sebagai rekaman informasi perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat dan organisasi	OPD, LKD, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indikator kinerja OPD tidak tercapai sepenuhnya	Risiko Operasional	Perencanaan dan monitoring kurang optimal	Capaian kinerja dibawah 100%	OPD
4	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat tidak ada cadangan/back up arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	Risiko Operasional	Fisik arsip mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu	Hilangnya informasi arsip yang sesuai penjaminan keabsahan arsip	PD, LKD, Masyarakat
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Turunnya nilai Survey kepuasan Masyarakat	Risiko Operasional	- kurangnya sarana dan prasarana Layanan Arsip - Sistem layanan Arsip statis	kepuasan Pengguna/Pengunjung menurun	Masyarakat (Peneliti, Mahasiswa, Lembaga/Organisasi)
1	Sasaran Program	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	Risiko Operasional	Berkurangnya prioritas anggaran terkait akreditasi	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi	Perpustakaan kewenangan provinsi
1	Sasaran Program	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Turunnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Risiko Operasional	Turunnya nilai kepuasan masyarakat	Kepuasan masyarakat menurun	institusi dan masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Koleksi daerah dan lokal konten Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	Risiko Operasional	Penyerahan KCKR, Katalog Induk Daerah (KID), Bibliografi Daerah dan pengolahan konten lokal tidak optimal	Keberadaan koleksi daerah dan lokal konten di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak lengkap	Instansi, Penerbit dan Masyarakat

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator kinerja OPD tidak tercapai sepenuhnya	3	3	9	Ada	Monitong dan evaluasi capaian kinerja secara rutin	Memadai	2	3	6
Kurang optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	4	4	16	Ada	Evaluasi berkala, koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD untuk pemenuhan sarpras	Memadai	2	2	4
Pelaksanaan pengawasan kearsipan belum sesuai dengan ketentuan	4	4	16	Ada	Peningkatan kualitas SDM pengawasan kearsipan	Belum Memadai	3	3	9
Pengelolaan Arsip kurang sesuai NSPK	4	3	12	Ada	Sosialisasi, pembinaan, dan bintek	Memadai	3	3	9
Kurang optimalnya PD dalam melaksanakan pemusnahan arsip	4	3	12	Ada	Pendampingan pemusnahan arsip PD	Memadai	3	2	6
Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat bencana	3	4	12	Ada	Mitigasi risiko kerusakan arsip akibat bencana	Memadai	3	3	9
Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat tidak ada cadangan/back up arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	3	5	15	Ada	Alih media arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	Belum Memadai	3	3	9
Turunnya nilai Survey kepuasan Masyarakat	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Sekretariat berkaitan dengan sarana dan Prasarana Layanan Arsip	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	4	4	16	Ada	Memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan akreditasi dan re-akreditasi perpustakaan umum daerah kewenangan provinsi	Belum Memadai	4	3	12
Turunnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4	3	12	Ada	Penambahan Inovasi layanan perpustakaan	Memadai	3	3	9
Koleksi daerah dan lokal konten Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	4	3	12	Ada	1. Mengolah KID dan Bibliografi Daerah yang sudah diterima di perpustakaan 2. Melaksanakan alih media koleksi naskah kuno yang terdapat di perpustakaan 3. Melaksanakan pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	Memadai	3	3	9

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	12	Bidang Pengembangan Perpustakaan	Berkurangnya prioritas anggaran terkait akreditasi	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja kurang optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan waktu penyusunan dokumen, kesulitan pengumpulan data dukung	Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran kurang efektif dan efisien	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Perhitungan gaji ASN dan honorarium pengelola keuangan perangkat daerah tidak valid	Risiko Operasional	Kurang tepatnya perhitungan gaji ASN dan honorarium pengelola keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan tidak sesuai dengan dokumen anggaran	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Data Asset Perangkat Tidak valid dan tidak terjaminnya keamanan asset Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Tidak tertib administrasi dalam pengelolaan asset	Data Asset Perangkat Tidak sesuai dengan administrasi dan asset tidak mendapatkan jaminan keamanan	Perangkat Daerah dan Asset BMD
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Banyaknya kasus kesalahan administrasi di bidang administrasi kepegawaian	Risiko Operasional	Minimnya Wawasan ASN terhadap regulasi kepegawaian; dan Tidak tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian secara mandiri sesuai regulasi	Penurunan kinerja perangkat daerah, terjadinya konflik ASN, dokumen hilang, peningkatan SDM ASN kurang diperhatikan	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian	Pihak yang Terkena
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum PD tidak memenuhi standar layanan	Risiko Operasional	Kurangnya sarpras dan kebutuhan peralatan kantor; dan adanya penyimpangan spesifikasi barang yang dibutuhkan dalam proses pengadaan	Sarpras dan fasilitas layanan tidak memenuhi standar pelayanan	Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Spesifikasi barang yang diadakan tidak sesuai dengan pagu anggaran belanja	Risiko Fraud	Dalam proses pengadaan terjadi kecurangan	Barang yang diterima tidak memenuhi kebutuhan karena berbeda spesifikasi	Perangkat Daerah
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang optimalnya layanan administrasi dan layanan publik	Risiko Operasional	Kurangnya kualitas SDM administrasi dan kuantitas SDM tenaga IT	Layanan informasi publik tidak optimal	Perangkat Daerah
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Risiko Fraud	- Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan, - Keterlibatan pihak ketiga dalam pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Hasil pemeliharaan kurang sesuai standar; - Kebutuhan anggaran melebihi kewajaran	Perangkat Daerah dan Masyarakat
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Tidak adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan	Risiko Operasional	Tidak ada mekanisme atau SOP yang jelas untuk tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan	Masalah pengelolaan arsip tidak diperbaiki dan terus berulang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Tidak terlaksananya seluruh isi klausul dalam Perjanjian Teknis Kerjasama	Risiko Kemitraan	Permasalahan kearsipan belum dianggap penting oleh mitra	Pengelolaan arsip pada Lembaga mitra belum memenuhi NSPK	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Kwantitas belum sebanding dengan kualitas arsiparis	Risiko Operasional	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terkelola	Tidak terkelolanya arsip statis khazanah Dinarpus	Risiko Operasional	Perlindungan terhadap SDM pengelola arsip dari ancaman penyakit masih kurang	Arsip yang terkelola menjadi kurang secara kualitas dan kuantitas	PD, LKD, Masyarakat
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Efisiensi ruang penyimpanan arsip (record centre) tidak tercapai	Risiko Operasional	Ruang penyimpanan arsip dipenuhi arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna	Ruang penyimpanan tidak mampu menampung arsip	LKD dan PD
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat bencana	Risiko Operasional	Fisik arsip semakin rusak akibat bencana	Hilangnya arsip sebagai rekaman informasi perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat dan organisasi	OPD, LKD, Masyarakat
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dialih-mediakan	Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat tidak ada cadangan/back up arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	Risiko Operasional	Informasi yang terkandung dalam arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip perlu diselamatkan	Hilangnya informasi arsip yang sesuai penjaminan keabsahan arsip	OPD, LKD, Masyarakat
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip yang terlayankan	Minimnya khasanah arsip statis yang diakses masyarakat	Risiko Operasional	Keterbatasan khasanah arsip statis yang disajikan; Minimnya pemenuhan anggaran	Jumlah peminjaman arsip menurun	Masyarakat (Peneliti, Mahasiswa, Lembaga/Organisasi)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip yang terlayankan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses arsip secara daring maupun online	Risiko Operasional	Kurangnya pengetahuan arsip masyarakat; dan Terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses arsip	Jumlah kunjungan menurun	Masyarakat (Peneliti, Mahasiswa, Lembaga/Organisasi)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian	Pihak yang Terkena
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Rendahnya jumlah unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Risiko Operasional	Kurang menariknya kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Jumlah parsipasi unit kearsipan dan LKD Provinsi Rendah dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit Kearsipan dan LKD Provinsi
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Rendahnya Jumlah Unit Kearsipan dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Risiko Operasional	Kurang menariknya kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Jumlah partisipan dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip rendah	Unit Kearsipan dan LKD Provinsi
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	Risiko Operasional	Perpustakaan Umum Kab/Kota masih memprioritaskan anggaran untuk pengembangan layanan perpustakaan	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi	Perpustakaan kewenangan provinsi
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	Risiko Operasional	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi	Pustakawan dan masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	Risiko Operasional	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Masih ada Perpustakaan SMA/SMK yang belum memahami dan menerapkan SNP	Risiko Operasional	Minimnya pengetahuan tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Penyelenggaraan perpustakaan tidak sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Turunnya nilai kepuasan Masyarakat	Risiko Operasional	Penerbit mengikuti pergerakan ekonomi yang berlaku	Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengganti daftar judul buku yang sudah diseleksi dengan judul lain	Institusi, penerbit dan masyarakat
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jenis layanan perpustakaan tidak berkembang	Risiko Operasional	Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung	Kepuasan masyarakat menurun	Instansi dan masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Pengunjung menurun	Risiko Operasional	Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan	Kepuasan masyarakat menurun	Instansi dan masyarakat
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Minimnya partisipasi masyarakat	Risiko Operasional	Kurangnya minat masyarakat	Kepuasan masyarakat menurun	Instansi dan masyarakat
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penerimaan koleksi Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	Risiko Kepatuhan	Penerbit/produsen KCKR kurang tertib menyerahkan koleksi Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Data informasi Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) belum optimal	Instansi dan Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah terbatas	Risiko Kepatuhan	Penyerahan Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kurang optimal	Terbitan Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah tidak tersaji secara utuh	Instansi dan Masyarakat
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan	Minimnya sumber informasi naskah kuno	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menginformasikan keberadaan naskah kuno	Hasil alih media naskah kuno jumlahnya sedikit	Instansi dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian	Pihak yang Terkena
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah	Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	Risiko Operasional	Pengolahan koleksi etnis budaya nusantara masih dari hibah masyarakat	Kebutuhan informasi Koleksi etnis budaya nusantara belum terpenuhi	institusi dan masyarakat

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja kurang optimal	3	3	9	Ada	Mempersiapkan lebih awal, membuat pola waktu penyusunan, berkomunikasi lebih intens dengan pengampu terkait informasi terbaru, koordinasi dengan kontributor data	Memadai	2	2	4
Perhitungan gaji ASN dan honorarium pengelola keuangan perangkat daerah tidak valid	4	4	16	Ada	Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan kepegawaian terkait data ASN dan BPKAD terkait penganggaran gaji	Memadai	2	2	4
Data Asset Perangkat Tidak valid dan tidak terjaminnya keamanan asset Perangkat Daerah	3	3	9	Ada	Tertib administrasi pengelolaan asset dan selalu koordinasi dengan BPKAD dan Sub Bagian Umpeg	Memadai	2	2	4
Banyaknya kasus kesalahan administrasi di bidang administrasi kepegawaian	3	3	9	Ada	Berkordinasi dengan BKD, Biro Organisasi dan ASN	Memadai	2	2	4
Layanan administrasi umum PD tidak memenuhi standar layanan	3	3	9	Ada	monitoring proses pengadaan barang, menganggarkan untuk perbaikan sarpras dan peralatan kantor; dan Optimaliasasi sarpras yang ada	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Spesifikasi barang yang diadakan tidak sesuai dengan pagu anggaran belanja	3	5	15	Ada	Monitoring pengadaan barang dan jasa	Memadai	1	5	5
Kurang optimalnya layanan administrasi dan layanan publik	4	4	16	Ada	Optimalisasi sarana layanan publik yang tersedia	Memadai	2	2	4
Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3	5	15	Ada	- Seleksi penyedia sesuai kompetensi - Monitoring proses pemeliharaan secara lebih intens	Memadai	1	5	5
Tidak adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan	4	4	16	Ada	Harmonisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota	Belum Memadai	3	4	12
Tidak terlaksananya seluruh isi klausul dalam Perjanjian Teknis Kerjasama	4	4	16	Ada	Pendampingan dan peningkatan kualitas SDM kearsipan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	Belum Memadai	3	3	9
Kwantitas belum sebanding dengan kualitas arsiparis	4	4	16	Belum Ada	Menyelenggarakan Sertifikasi SDM Kearsipan bekerjasama dengan BPSDMD	Belum Memadai	4	4	16
Tidak terkelolanya arsip statis khazanah Dinarpus	3	3	9	Ada	Sosialisasi, APD dan penggunaan sarpras yang memadai	Belum Memadai	3	3	9
Efisiensi ruang penyimpanan arsip (record centre) tidak tercapai	3	3	9	Ada	Pemusnahan arsip secara rutin	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat bencana	3	3	9	Ada	Mitigasi resiko kerusakan arsip akibat bencana	Belum Memadai	3	3	9
Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat tidak ada cadangan/back up arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	3	3	9	Ada	Alih media arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	Belum Memadai	3	3	9
Minimnya khasanah arsip statis yang diakses masyarakat	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip untuk menambah khasanah arsip statis	Belum Memadai	2	3	6
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses arsip secara daring maupun online	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Sekretariat untuk memfasilitasi sarana akses arsip; Koordinasi dengan pihak ketiga sebagai subyek yang memanfaatkan arsip	Belum Memadai	2	3	6
Rendahnya jumlah unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	3	4	12	Ada	Membuat kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip secara menarik (inovasi kegiatan)	Belum Memadai	3	3	9
Rendahnya Jumlah Unit Kearsipan dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	3	4	12	Ada	Membuat kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip secara menarik (inovasi kegiatan)	Belum Memadai	3	3	9
Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	4	3	12	Ada	Memfasilitasi pelaksanaan re-akreditasi pada perpustakaan kewenangan provinsi	Belum Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	4	4	16	Ada	Sosialisasi tentang Manfaat Uji Sertifikasi	Belum Memadai	4	3	12
Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	4	4	16	Ada	Mengadakan Kegiatan Lomba Bidang Perpustakaan; Bimtek Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi; Lomba Video Konten Literasi; Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Membaca; dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Memadai	4	3	12
Masih ada Perpustakaan SMA/SMK yang belum memahami dan menerapkan SNP	4	3	12	Ada	Melaksanakan pembinaan perpustakaan	Memadai	4	2	8
Turunnya nilai kepuasan Masyarakat	3	3	9	Ada	Menyusun daftar buku untuk pengadaan dan menyediakan daftar judul cadangan	Memadai	2	2	4
Jenis layanan perpustakaan tidak berkembang	4	3	12	Ada	Membuat Inovasi layanan	Belum Memadai	3	3	9
Pengunjung menurun	4	3	12	Ada	Promosi melalui medsos, fieldtrip, dan demonstrasi i-jateng	Belum Memadai	3	3	9
Minimnya partisipasi masyarakat	4	3	12	Ada	Promosi melalui medsos, fieldtrip dan demonstrasi i-jateng	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Penerimaan koleksi Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	4	3	12	Ada	Menghimpun terbitan KCKR dari penerbit dan melaksanakan hunting/pemantauan ke penerbit	Belum Memadai	3	3	9
Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah terbatas	4	3	12	Ada	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah se-Jawa Tengah	Belum Memadai	3	3	9
Minimnya sumber informasi naskah kuno	4	3	12	Belum Ada	Melaksanakan hunting naskah kuno di masyarakat	Belum Memadai	3	3	9
Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	4	4	16	Ada	Melaksanakan kegiatan pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	Belum Memadai	2	3	6

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan	12	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Tidak ada mekanisme atau SOP yang jelas untuk tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan	Masalah pengelolaan arsip tidak diperbaiki dan terus berulang
Kwantitas belum sebanding dengan kualitas arsiparis	16	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi
Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	12	Bidang Pengembangan Perpustakaan	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi
Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	12	Bidang Pengembangan Perpustakaan	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat

DINAS/OPD: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Semua Bidang

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Tidak adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan	12	Tidak ada mekanisme atau SOP yang jelas untuk tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan	Masalah pengelolaan arsip tidak diperbaiki dan terus berulang	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola arsip	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	TW IV
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Kwantitas belum sebanding dengan kualitas arsiparis	16	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi	Meningkatkan kompetensi Arsiparis sesuai jenjang jabatan	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	TW IV
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	12	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi	Sosialisasi tentang Manfaat Uji Sertifikasi	Pokja Pembinaan Perpustakaan	TW IV
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	12	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Mengadakan Kegiatan Lomba Bidang Perpustakaan; Bimtek Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi; Lomba Video Konten Literasi; Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Membaca; dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pokja Pembudayaan Kegemaran Membaca	TW I dan TW II